KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR ricuh: KMP tawarkan 12 posisi
Tanggal : Selasa, 04 November 2014
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1 dan 19

DPR Ricuh

KMP Tawarkan 12 Posisi

Jakarta, Pelita

Ketegangan di parlemen menunjukkan tanda-tanda mulai mencair. Koalisi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen, mulai melunak.

KMP mengisyaratkan membuka pintu kepada rivalnya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH), dengan menggelindingkan wacana pemekaran komisi. Dengan pemekaran ini, KIH bisa mendapatkan 12 atau lebih kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan (AKD) di DPR.

> Terus memanasnya perseteruan politik di DPR antara kubu KMP versus KIH akibat krisis komunikasi politik.

"Syaratnya mereka harus mau bekerja sama dan membubarkan DPR tandingan yang tengah dibentuk," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, kemarin. Fahri menjelaskan, pembentukan tiga komisi baru di DPR saat ini sedang dikaji. Setiap komisi terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua.

Jika terbentuk, kata dia, maka setidaknya KIH sudah mendapatkan 12 kursi pimpinan komisi. "Asal mereka mau bekerja sama, mereka bisa masuk di situ,"kata Fahri. Adapun pimpinan 11 komisi lainnya yang sudah ditetapkan, menurut Fahri, masih bisa berubah.

Semuanya tergantung pada lobi dan pembicaraan di setiap komisi yang ada. "Kalau mereka (KIH) sudah menyerahkan nama dan masuk ke dalam setiap komisi, pimpinan itu bisa dibicarakan," kata Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera itu.

Belum lagi, Fahri melanjutkan, masih ada alat kelengkapan lain yang sejauh ini belum memiliki komposisi pimpinan secara lengkap. "BURT masih kurang, Banggar belum,

Bersambung Halaman 19

KMP Tawarkan 12 Posisi

▶Sambungan dari Hal 1

semuanya masih bisa diomongin," katanya.

Lebih jauh Fachri menyatakan, beberapa komisi yang memiliki terlalu banyak mitra kerja bisa dipecah. Fahri mencontohkan Komisi I DPR yang memiliki 15 mitra kerja yang terdiri dari tiga bidang berbeda, yakni pertahanan, luar negeri, dan informatika.

"Kalau ada pemisahan, informasi bisa dikeluarkan misalnya, dan dibuat ke dalam komisi yang baru. Nanti kemitraan bisa fokus," katanya. Saat ini, 11 komisi dan alat kelengkapan DPR lain "disapu bersih" oleh Koalisi Merah Putih. Proses pemilihan pimpinan tersebut tetap digelar meski tanpa kehadiran fraksi kubu KIH.

Karena permintaan pembagian pimpinan AKD secara proporsional tidak diakomodasi, fraksi kubu KIH membentuk struktur pimpinan DPR tandingan. Kubu KIH tidak mengakui kepemimpinan DPR yang dikuasai KMP dan akan memilih pimpinan AKD versi mereka.

Sikap lunak ini belum mendapat tanggapan berarti dari KIH. Saat DPR menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus), KIH juga menggelar rapat serupa di tempat berbeda. Mereka juga memutuskan jatah setiap parpol dalam AKD.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan, rencana KMP memberikan jatah kursi pimpinan untuk KIH, bukan jalan keluar yang diinginkan. Masalah ini, kata dia, lebih kompleks dibanding sekedar jatah kursi pimpinan. "Memangnya mereka punya kursi itu 100 persen mau ngasih ke kita?" katanya. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melanjutkan DPR tandingan ini.

Pada Selasa (4/11) hari ini, DPR tandingan akan mengadakan sidang paripurna lanjutan untuk menetapkan komposisi komisi. Bagi Wakil Ketua DPR sementara versi KIH ini, inisiatif untuk bersatu harus datang dari kedua belah pihak, baik KIH atau pun Koalisi Merah Putih.

Namun, kata dia, KMP belum menunjukkan keinginan untuk bersatu. "Saya juga berharap begitu (DPR bersatu). Tapi harapan itu harus datang dari kedua belah pihak," kata Effendi. Anggota KIH lainnya memberi isyarat bersedia membubarkan DPR tandingan yang mereka buat, jika pimpinan dewan saat ini mengakomodasi keinginan KIH mendapat 16 pimpinan (AKD).

"Secara otomatis bubar, ini kan sementara. Kalau sekarang, besok dibubarin. Kalau tidak dibutuhkan mediator," kata anggota KIH dari partai NasDem Johny G Plate.

Di lain pihak, Komisi III DPR RI akan mulai bekerja pada pekan ini dengan mengagendakan rapat kerja bersama sejumlah institusi mitra. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

"Hari ini kami rapat pleno (internal) untuk meminta persetujuan anggota soal rapat-rapat dengan mitra kerja itu," kata Azis. Ia menyebutkan, Komisi III telah mengagendakan waktu rapat dengan Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung.

"Rabu (5/11), rencananya dengan Polri, Kamis (6/11) dengan Kemenhuk dan HAM, Senin (11/11/2014) depan dengan Kejaksaan Agung, Rabu (13/11) dengan BNN (Badan Narkotika Nasional)," kata Azis.

Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, terus memanasnya perseteruan politik di DPR antara kubu KMP versus KIH akibat krisis komunikasi politik.

"KIH terlalu Megasentris. Semuanya tergantung Megawati padahal komunikasi politik Megawati sangat kaku. Walau KMP merupakan oposisi di pemerintahan tapi fakta KMP sudah merajai parlemen. KIH harus sadari itu," kata Sebastian.

Agar kekisruhan di Senayan tidak berkepanjangan, ketua Formappi itu mendesak para ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat turun tangan dan membuka komunikasi politik. **(cr-02)**